

LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM



LEMBAGA JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2022

KATA PENGANTAR

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan dalam rangka meninjau sistem manajemen yang telah dilaksanakan di Universitas Borobudur dalam rangka memastikan kelanjutan kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas manajemen. Tinjauan dimaksudkan untuk melihat adanya peluang untuk menjadi lebih baik atau adanya kebutuhan akan perubahan sistem manajemen.

Dalam agenda rapat tinjauan manajemen membahas masalah yang memiliki potensi sama terjadi berulang dan memerlukan penyelesaian mendesak untuk dicarikan segera penyelesaiannya. Pembahasan dalam RTM meliputi: hasil audit internal, umpan balik pelanggan, kinerja proses dan pencapaian sasaran, status tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan, tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan, dan rencana kegiatan untuk pengembangan.

Rapat Tinjauan Manajemen (Management Review Meeting) pada hakikatnya merupakan salah satu kegiatan wajib yang mesti dilakukan suatu Institusi/Perguruan Tinggi yang sudah atau baru mulai menerapkan (melaksanakan) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Diharapkan dengan adanya pedoman ini menjadi lebih mudah bagi kita dalam mewujudkan peningkatan mutu dalam segala sektor, khususnya dalam penerepan manajemen resiko untuk pengaplikasian SPMI.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. TEMUAN HASIL AMI.....	3
BAB III TINJAUAN MANAJEMEN.....	29
BAB III. PENUTUP.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya peningkatan mutu perlu dilakukan pembahasan bersama antara manajemen dan pelaksana tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan implementasi sistem manajemen mutu, pencapaian sasaran/indikator mutu dan kinerja. Pembahasan masalah mutu dan kinerja dapat dilakukan dalam unit kerja, antar unit kerja untuk masalah-masalah yang bersifat teknis dan operasional yang dilakukan baik terjadwal maupun insidental sesuai dengan kebutuhan. Permasalahan mutu, kinerja, dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan sistem manajemen mutu secara periodik juga perlu dibahas bersama yang melibatkan seluruh jajaran yang ada dalam organisasi. Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan tinjauan manajemen atau pertemuan telaah manajemen mutu dan kinerja. Pertemuan tinjauan manajemen adalah proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu yang dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan operasional kegiatan organisasi.

Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan rapat tertinggi dalam sistem manajemen mutu yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem secara menyeluruh di tingkat Universitas. Secara hierarki RTM dipimpin langsung oleh pimpinan, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen. Kegiatan rapat tinjauan manajemen menjadi sangat penting dalam sistem manajemen mutu, karena di dalamnya akan dibahas sejumlah evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh masing-masing lini manajemen di Unbor. Tinjauan manajemen dilakukan untuk memastikan apakah temuan dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan bahwa sistem mutu berjalan efektif dan efisien. Tinjauan ini harus mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem mutu, termasuk kebijakan mutu serta sasaran mutu. Setiap kegiatan tinjauan manajemen harus terdokumentasi dengan baik, dan dokumentasinya harus dipelihara sebagai arsip dan tinjauan mutu. Materi tinjauan manajemen tidak hanya berupa hasil/temuan audit namun dapat juga berupa umpan balik pelanggan (keluhan pelanggan, survei kepuasan pelanggan), kinerja layanan/kinerja dosen, analisa kesesuaian kompetensi, status tindak lanjut permintaan koreksi, tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan sistem mutu ataupun usulan peningkatan sistem mutu.

1.2 Lingkup

Laporan membahas masalah- masalah yang berkaitan dengan penerapan sistem mutu atau masalah lain yang terkait dengan mutu di Universitas Borobudur.

1) RTM tingkat Universitas

Rapat ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Universitas, pimpinan Fakultas, Lembaga dan Unit serta pihak lain yang dibutuhkan.

2) RTM tingkat Fakultas

Rapat ini dihadiri oleh pimpinan Fakultas, Program Studi, Kepala Laboratorium dan pihak lain yang dibutuhkan.

1.3 Tujuan

- 1) Tinjauan manajemen merupakan suatu proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem manajemen mutu, dengan cara melakukan pembahasan secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.
- 2) Laporan ini digunakan sebagai acuan perwujudan komitmen manajemen untuk memastikan sistem mutu berjalan secara efektif dan berkesinambungan serta sebagai sarana untuk melakukan perbaikan terus menerus.
- 3) Proses peninjauan, evaluasi serta penilaian oleh manajemen pada selang waktu terencana untuk memastikan kesesuaian, kecukupan serta keefektifan manajemen mutu berjalan secara konsisten

BAB II

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Standar Pendidikan

Standar Kompetensi Lulusan

1. Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Belum ada standar pencapaian pembelajaran lulusan yang jelas	Ilmu Hukum

2. IPK lulusan

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Rata-rata IPK lulusan diatas 3,00	Ilmu Hukum

3. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Ada, tetapi masih kurang prestasi mahasiswa dibidang akademik pada tingkat nasional dan internasional	Ilmu Hukum

4. Prestasi mahasiswa di bidang non akademik dalam 3 tahun terakhir.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Ada, tetapi masih kurang prestasi non akademik mahasiswa di tingkat nasional dan internasional	Ilmu Hukum

5. Masa studi.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Rata-rata masa studi lulusan lebih dari 4 tahun	Ilmu Hukum

6. Kelulusan tepat waktu.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Persentase kelulusan tepat waktu masih kurang dari 40%	Ilmu Hukum

7. Keberhasilan studi.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Persentase keberhasilan studi kurang dari 95%	Ilmu Hukum

8. Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Belum semua populasi lulusan TS-4 s/d TS-2 yang disurvei	Ilmu Hukum

9. Waktu tunggu.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Rata-rata waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama lebih dari 6 bulan	Ilmu Hukum

10. Kesesuaian bidang kerja.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Lulusan yang bekerja sesuai dengan bidangnya kurang dari 80%	Ilmu Hukum

11. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan pada skala nasional dan internasional masih minim	Ilmu Hukum

12. Tingkat kepuasan pengguna lulusan.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Masih ada pengguna lulusan yang belum puas pada kinerja lulusan	Ilmu Hukum

Standar Isi Pembelajaran

1. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Ada keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam proses evaluasi kurikulum	Ilmu Hukum

2. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNI.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Capaian pembelajaran sudah disusun berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 dan level KKNi namun profil lulusan masih perlu disempurnakan	Ilmu Hukum

3. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Struktur kurikulum sudah sesuai dengan capaian pembelajaran, hanya masih perlu dijabarkan dalam CPMK dan RPS	Ilmu Hukum

Standar Proses Pembelajaran

1. Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Proses pembelajaran ada menerapkan SCL dalam pembelajaran	Ilmu Hukum

2. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dan Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	RPS masih perlu disesuaikan dengan kedalaman dan keluasan capaian pembelajaran	Ilmu Hukum

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar sudah optimal	Ilmu Hukum

4. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
----	--------------	------------------	------------

1	Ob	Pelaksanaan Pemantauan/kesesuaian Proses Pembelajaran dengan rencana pembelajaran semester rutin dilaksanakan sudah divalidasi oleh Kaprodi	Ilmu Hukum
---	----	---	------------

5. Pelaksanaan Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Proses penelitian/pelaksanaan penelitian sudah terkait dengan pembelajaran	Ilmu Hukum

6. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Proses penelitian/pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sudah terkait dengan pembelajaran	Ilmu Hukum

7. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	KTS Minor	Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang sesuai dengan metode pembelajaran dan capaian pembelajaran cukup baik	Ilmu Hukum

8. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan sudah dilaksanakan sepenuhnya	Ilmu Hukum

9. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP masih kurang	Ilmu Hukum

10. Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik masih belum optimal	Ilmu Hukum

11. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dan Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa pada proses pendidikan sudah dianalisis tetapi belum semuanya ditindak lanjuti	Ilmu Hukum

Standar Penilaian Pembelajaran

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran sudah dilaksanakan	Ilmu Hukum

2. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian terintegrasi	Ilmu Hukum

3. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Dalam RPS belum dilengkapi dengan Rubrik penilaian	Ilmu Hukum

4. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Belum terlaksana secara sistematis monev hasil penilaian dan belum ada bukti tindak lanjut	Ilmu Hukum

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Kecukupan jumlah DTSP.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Jumlah dosen sesuai dengan bidang ilmu baru memenuhi kriteria minimum 5 orang	Ilmu Hukum

2. Kualifikasi akademik DTSP.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Kualifikasi pendidikan dosen yang memiliki jenjang pendidikan doktor (S3) masih kurang dari 40%	Ilmu Hukum

3. Jabatan akademik DTSP.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Kualifikasi dosen yang memiliki jenjang jabatan akademik lektor, lektor kepala dan guru besar masih kurang dari 50%	Ilmu Hukum

4. Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen cukup	Ilmu Hukum

5. Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Penugasan dosen sebagai pembimbing utama masih melebihi 6 orang per dosen	Ilmu Hukum

6. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Komposisi EWMP dosen masih didominasi oleh kegiatan Pendidikan dan Pengajaran	Ilmu Hukum

7. Dosen tidak tetap.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Dosen tidak tetap sudah kurang dari 15%	Ilmu Hukum

8. Kinerja Dosen Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS masih belum optimal	Ilmu Hukum

9. Upaya pengembangan dosen.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Ada rencana pengembangan SDM dalam jangka pendek dan panjang	Ilmu Hukum

10. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) yang memiliki sertifikat	Ilmu Hukum

11. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
----	--------------	------------------	------------

1	Ob	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi yang memiliki sertifikat	Ilmu Hukum
---	----	--	------------

Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran

1. Kecukupan sarana dan prasarana

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Sarana dan prasarana cukup tersedia, namun kualitasnya masih perlu dimutakhirkan	Ilmu Hukum

2. aksesibilitas sarana dan prasarana

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	aksesibilitas sarana dan prasarana sudah memiliki SOP	Ilmu Hukum

3. mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik sudah berjalan dengan baik	Ilmu Hukum

Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi pada tingkat fakultas dan prodi sudah optimal	Ilmu Hukum

2. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil	Ilmu Hukum

		masih perlu dilanjutkan	
--	--	-------------------------	--

3. Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Indikator kinerja tambahan belum diwujudkan dalam renstra dan rencana kerja	Ilmu Hukum

4. Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Kinerja sudah diukur, dievaluasi, dan dianalisis	Ilmu Hukum

Standar Penelitian

Standar Hasil Penelitian

1. Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir belum optimal	Ilmu Hukum

2. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir masih belum optimal	Ilmu Hukum

3. Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir masih belum optimal	Ilmu Hukum

4. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir belum optimal	Ilmu Hukum

Standar Isi Penelitian

1. Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Sudah ada Road Map (peta jalan) penelitian	Ilmu Hukum

2. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan,

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Belum ada evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan	Ilmu Hukum

3. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Belum ada evaluasi relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan	Ilmu Hukum

Standar Proses Penelitian

1. Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir masih minim	Ilmu Hukum

2. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Positif	Kegiatan penelitian mahasiswa (skripsi)	Ilmu Hukum

		dihargai 6 sks	
--	--	----------------	--

Standar Penilaian Penelitian

1. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi sudah memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	Ilmu Hukum

2. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Positif	Kegiatan penelitian mahasiswa (skripsi) dihargai 6 sks	Ilmu Hukum

Standar Peneliti

1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Masih belum semua peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian	Ilmu Hukum

2. Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir masih belum optimal	Ilmu Hukum

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik cukup baikl	Ilmu Hukum

Standar Pengelolaan Penelitian

1. Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Positif	Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian oleh LPPM	Ilmu Hukum

2. Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Masih kurangnya Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa	Ilmu Hukum

Standar Pembiayaan Penelitian

1. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian DTSP

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Masih kurangnya dana Penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian DTSP	Ilmu Hukum

2. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian digunakan untuk membiayai: manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
----	--------------	------------------	------------

1	Ob	Masih kurangnya dana pengelolaan Penelitian digunakan untuk membiayai: manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual	Ilmu Hukum
---	----	--	------------

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Hasil PkM

1. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Masih kurangnya Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.	Ilmu Hukum

2. Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Masih kurangnya Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	Ilmu Hukum

3. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Masih kurangnya Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir	Ilmu Hukum

Standar Isi PkM

1. dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM,

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Masih kurangnya dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, dan sudah ada peta jalan	Ilmu Hukum

2. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan **pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Masih kurangnya hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Ilmu Hukum

Standar Proses PkM

1. PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Dalam pelaksanaan PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir cukup baik namun perlu ditingkatkan.	Ilmu Hukum

2. **Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester**

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Masih kurangnya Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester	Ilmu Hukum

Standar Penilaian PkM

1. **Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan**

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Masih kurangnya penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan	Ilmu Hukum

2. **Mengukur tingkat kepuasan masyarakat; terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;**

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Masih kurangnya tingkat pengukuran kepuasan masyarakat; terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program	Ilmu Hukum

Standar Pelaksana PkM

1. Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Pelaksana PkM belum semua memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Ilmu Hukum

2. Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir cukup	Ilmu Hukum

Standar Sarana dan Prasarana PkM

1. Kecukupan sarana dan prasarana,

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Kecukupan sarana dan prasarana masih perlu dioptimalkan	Ilmu Hukum

2. aksesibilitas sarana dan prasarana

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Kecukupan sarana dan prasarana masih perlu dioptimalkan	Ilmu Hukum

3. mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik sudah ada	Ilmu Hukum

Standar Pengelolaan PkM

1. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola PkM

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Positif	Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang	Ilmu Hukum

		bertugas untuk mengelola PkM oleh LPPM	
--	--	--	--

2. Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Masih kurangnya relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa	Ilmu Hukum

Standar Pembiayaan PkM

1. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pelaksanaan PkM dan

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Pengelolaan dana internal untuk pelaksanaan PkM masih kurang optimal	Ilmu Hukum

2. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat DTSP

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat DTSP masih kurang optimal	Ilmu Hukum

Standar Lainnya

Standar Identitas

1. Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya	Ilmu Hukum

2. Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS Prodi

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS Prodi	Ilmu Hukum

3. Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	Ilmu Hukum

4. Pimpinan harus memiliki elemen esensial dan strategis dalam membentuk identitas suatu perguruan tinggi seperti : logo; lagu mars dan hymne; warna identitas (corporate colour); desain grafis standar untuk dokumen resmi; seragam (jaket almamater maupun seragam karyawan) dan kartu nama;

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	memiliki elemen esensial dan strategis dalam membentuk identitas suatu perguruan tinggi seperti : logo; lagu mars dan hymne; warna identitas (corporate colour); desain grafis standar untuk dokumen resmi; seragam (jaket almamater maupun seragam karyawan) dan kartu nama	Ilmu Hukum

Standar Pengelolaan Organisasi

1. Memiliki dokumen analisis jabatan (deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan) sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Dokumen analisis jabatan (deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan) sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja	Ilmu Hukum

2. Komitmen pimpinan UPPS kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Komitmen pimpinan UPPS kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan public sudah ada	Ilmu Hikum

3. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
----	--------------	------------------	------------

1	Ob	Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut	Ilmu Hukum
---	----	---	------------

4. Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek	Ilmu Hukum

5. Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi 6 aspek	Ilmu Hukum

Standar Kerjasama

- Memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Masih kurangnya dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri	Ilmu Hukum

2. Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek	Ilmu Hukum

3. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Masih kurangnya Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir	Ilmu Hukum

4. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Masih kurangnya Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir	Ilmu Hukum

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu kerjasama untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu kerjasama untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi	Ilmu Hukum

Standar Kemahasiswaan

1. Kualitas Input Mahasiswa

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Rasio selektifitas mahasiswa masih rendah	Ilmu Hukum

2. Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Metode rekrutmen dan keketatan seleksi masih belum sempurna	Ilmu Hukum

3. Daya Tarik Program Studi Peningkatan animo calon mahasiswa.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Daya Tarik Program Studi Peningkatan animo calon mahasiswa belum maksimal.	Ilmu Hukum

4. Daya Tarik Program Studi Mahasiswa asing

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Daya Tarik Program Studi Mahasiswa asing	Ilmu Hukum

5. Layanan Kemahasiswaan Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Masih kurangnya Layanan Kemahasiswaan Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan	Ilmu Hukum

6. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Tersedianya akses dan mutu layanan kemahasiswaan	Ilmu Hukum

Standar Keuangan

1. Memiliki dokumen formal menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan UNBOR

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Tersedia dokumen formal untuk menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan UNBOR	Ilmu Hukum

2. Pimpinan menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja dan mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektorat/ Pimpinan UNBOR

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja dan mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektorat/ Pimpinan UNBOR	Ilmu Hukum

3. Pimpinan mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) oleh Yayasan Pendidikan Borobudur 1971

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Sistem Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) oleh Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 tersedia	Ilmu Hukum

4. Keuangan Biaya operasional pendidikan

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Keuangan Biaya operasional Pendidikan tersedia	Ilmu Hukum

5. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi	Ilmu Hukum

6. Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Tersedianya kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran	Ilmu Hukum

7. Pimpinan harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Menyusun SOP dalam pengelolaan keuangan	Ilmu Hukum

8. Universitas harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Tersedia lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal	Ilmu Hukum

Standar Kesejahteraan

1. Pimpinan wajib memastikan tersedianya pedoman mengenai sistem remunerasi, sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak pegawai, santunan kematian, dan THR bagi semua pegawai tetap.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Tersedianya pedoman mengenai sistem remunerasi, sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak pegawai, santunan kematian, dan THR bagi semua pegawai tetap	Ilmu Hukum

2. Pimpinan wajib memastikan tersedianya prosedur implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak pegawai, santunan kematian dan THR bagi semua pegawai.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Tersedianya prosedur implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak pegawai, santunan kematian dan THR bagi semua pegawai	Ilmu Hukum

3. Pimpinan dan Pimpinan wajib memastikan implementasi dari semua pedoman kesejahteraan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Implementasi dari semua pedoman kesejahteraan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.	Ilmu Hukum

4. Pimpinan wajib memastikan tersedianya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak pegawai, santunan kematian dan THR bagi semua pegawai tetap.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
----	--------------	------------------	------------

1	Ob	Adanya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak pegawai, santunan kematian dan THR bagi semua pegawai tetap.	Ilmu Hukum
---	----	---	------------

5. Pimpinan wajib memastikan tersedianya instrument untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Adanya instrument untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan	Ilmu Hukum

6. Pimpinan wajib memastikan terlaksananya survey kepuasan terhadap kesejahteraan Pegawai minimal satu kali / tahun.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Adanya survey kepuasan terhadap kesejahteraan Pegawai minimal satu kali/tahun	Ilmu Hukum

7. Pimpinan wajib memastikan adanya dampak hasil survey terhadap penyempurnaan pedoman kesejahteraan pegawai setiap tahun

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Adanya dampak hasil survey terhadap penyempurnaan pedoman kesejahteraan pegawai setiap tahun	Ilmu Hukum

Standar Sumber Daya Manusia

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Ilmu Hukum

2. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan Program Studi	Ilmu Hukum

3. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.	Ilmu Hukum

4. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi	Ilmu Hukum

5. Dosen program doktor dan program doktor terapan: harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI	Ilmu Hukum

6. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada: kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; Penelitian; dan PkM. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada: kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;	Ilmu Hukum

		pembimbingan dan pelatihan; Penelitian; dan PkM. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang	
--	--	---	--

7. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	Ilmu Hukum

Standar Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	Sarana dan prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Ilmu Hukum

2. Standar sarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas:perabot;peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi;instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai;

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	sarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas:perabot;peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi;instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai	Ilmu Hukum

3. Standar prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga;

ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan Perguruan Tinggi; ruang Dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum

No	Hasil Temuan	Deskripsi Temuan	Nama Prodi
1	Ob	prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan Perguruan Tinggi; ruang Dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum	Ilmu Hukum

BAB III

TINJAUAN MANAJEMEN

Standar Pendidikan

- a. standar kompetensi lulusan
Unit Pelaksana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Borobudur berupaya untuk memperbaiki kualitas standar kompetensi lulusan melalui perbaikan kurikulum, memperbaiki proses pembelajaran, memotivasi mahasiswa untuk dapat mencapai IPK lulusan, masa studi dan keberhasilan studi yang tepat waktu. Disamping memfasilitasi mahasiswa untuk dapat berprestasi secara akademik dan non akademik di tingkat nasional dan internasional.
- b. standar isi Pembelajaran
Untuk menyusun kurikulum keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal sangat penting dalam merumuskan profil lulusan dan capaian pembelajaran serta bahan kajian, kehadiran narasumber dari Asosiasi Profesi dan Perguruan Tinggi sejenis dapat membantu penyusunan kurikulum.
- c. standar proses Pembelajaran
Dalam proses pembelajaran adanya menerapkan SCL, RPS disesuaikan dengan kedalaman dan keluasan capaian pembelajaran, dimana interaksi antar dosen dan mahasiswa serta sumber belajar untuk mendapatkan hasil yang optimal, dimana pelaksanaan pemantauan/kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS rutin dilakukan melalui validasi oleh Kaprodi. Proses pembelajaran terkait dengan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sudah selesai dengan capaian pembelajaran dan mengacu kepada SN Dikti.
- d. standar penilaian pendidikan Pembelajaran
Standar penilaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian terintegrasi, monitoring dan evaluasi RPS perlu dilengkapi dengan rubrik penilaian yang belum terlaksana secara sistematis dan perlu ditindaklanjuti.
- e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Kualifikasi dosen dibidang ilmu telah memenuhi kriteria yang ditentukan, dan memiliki jenjang akademik belum memenuhi standar yang ditentukan, sedangkan rasio dosen terhadap mahasiswa cukup, dalam hal pengakuan/rekognisi bagi dosen masih kurang dan adanya rencana pengembangan SDM, tenaga kependidikan secara kualifikasi dan kecukupan berdasarkan Pendidikan dan jenis pekerjaan rata-rata memiliki sertifikat.
- f. standar sarana dan prasarana Pembelajaran
Sarana dan prasarana pembelajaran tersedia dengan baik dan sudah memiliki SOP sehingga perlu pemutahiran.
- g. standar pengelolaan

Kelengkapan struktur, organisasi dan keefektifan telah tersedia dalam mewujudkan good governant dan pemenuhan 5 pilar sistem tata pamong, sehingga kinerja dapat diukur, di evaluasi dan dianalisis

- h. standar pembiayaan Pembelajaran

..... ?

Standar Penelitian

- a. standar hasil Penelitian

Publikasi ilmiah, luaran penelitian, publikasi ilmiah mahasiswa baik yang dihasilkan secara mandiri atau DTSP dan PkM dengan tema yang relevan sudah dilakukan tapi belum optimal.

- b. standar isi Penelitian

Road Map penelitian sudah ada tetapi belum ada evaluasi kesesuaian penelitian dan pengembangan keilmuan.

- c. standar proses Penelitian

Penelitian DTSP dan mahasiswa sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal, sedangkan kegiatan mahasiswa dalam bentuk skripsi dihargai 6 sks.

- d. standar penilaian Penelitian

Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi sudah memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

- e. standar peneliti

Masih belum semua peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian, sehingga kegiatan penelitian DTSP masih belum optimal.

- f. standar sarana dan prasarana Penelitian

Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik cukup baik namun perlu dioptimalkan.

- g. standar pengelolaan Penelitian

Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan untuk mengelola Penelitian oleh LPPM, dan UPPS telah memiliki peta jalan sebagai dasar dalam melakukan penelitian dosen dan mahasiswa

- h. standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

Masih kurangnya dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian DTSP dalam membiayai manajemen penelitian seperti seleksi proposal, evaluasi, pelaporan

penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau Kekayaan Intelektual.

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir masih kurang, begitu juga publikasi ilmiah mahasiswa baik yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi.
- b. standar isi Pengabdian kepada Masyarakat
Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan sudah sesuai dengan peta jalan, tetapi dalam evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum optimal.
- c. standar proses Pengabdian kepada Masyarakat
Dalam pelaksanaan PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir cukup baik namun perlu ditingkatkan dan dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.
- d. standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
Masih kurangnya penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, Masih kurangnya tingkat pengukuran kepuasan masyarakat; terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
- e. standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana PkM belum semua memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan, sedangkan kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir cukup baik.
- f. standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
Kecukupan sarana dan prasarana sudah mempunyai SOP untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik sudah ada.
- g. standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola PkM oleh LPPM, berdasarkan peta jalan yang sudah ada.
- h. standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
Pengelolaan dana internal untuk pelaksanaan PkM masih kurang optimal.

Standar Lainnya

- a. standar identitas
Telah adanya kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) UPPS terhadap VMTS Perguruan Tinggi dan visi Program Studi yang dikelolanya, dalam Mekanismenya

keterlibatan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan guna pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti dengan elemen esensial dan strategis dalam membentuk identitas suatu perguruan tinggi seperti logo, lagu mars dan hymne, warna identitas (corporate colour), desain grafis standar untuk dokumen resmi, seragam (jaket almamater maupun seragam karyawan) dan kartu nama.

b. standar pengelolaan organisasi

Pengelolaan analisis jabatan disesuaikan dengan struktur organisasi dan tata kerja, Komitmen pimpinan UPPS kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan public sudah ada, Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut, Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, baik secara akademik maupun non akademik.

c. standar Kerjasama

Masih kurangnya dokumen formal yang lengkap atas kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama, baik di lembaga formal dalam dan luar negeri, keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan Program Studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama namun masih kurangnya kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.

d. standar kemahasiswaan

Rasio selektifitas mahasiswa masih rendah, metode rekrutment dan keketatan seleksi masih belum sempurna, daya tarik Program Studi dalam meningkatkan animo calon mahasiswa belum maksimal. Masih kurangnya layanan kemahasiswaan ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan, dan tersedianya akses dan mutu layanan kemahasiswaan

e. standar keuangan

Tersedia dokumen formal untuk menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan UNBOR, penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja dan mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektorat/Pimpinan UNBOR, dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) oleh Yayasan Pendidikan Borobudur 1971. Tersedianya keuangan biaya operasional Pendidikan, realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi cukup baik. Adanya penyusunan SOP dalam pengelolaan keuangan, tersedia lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal.

f. standar kesejahteraan

Adanya pedoman mengenai sistem remunerasi, sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak pegawai, santunan kematian, dan THR bagi semua pegawai tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya prosedur monitoring dan evaluasi, adanya instrument untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan, adanya survey kepuasan terhadap kesejahteraan pegawai minimal satu kali/tahun dan Adanya dampak hasil survey terhadap penyempurnaan pedoman kesejahteraan pegawai setiap tahun

g. standar sumberdaya manusia

Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan Program Studi. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan PkM dan kegiatan penunjang. Sedangkan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya

h. standar sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, sarana pembelajaran paling sedikit terdiri perabot, peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai.

BAB IV PENUTUP

Melalui pertemuan tinjauan manajemen berbagai permasalahan yang terkait dengan mutu dan kinerja, serta operasionalisasi sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan dalam memberikan pelayanan dan produk kepada pelanggan/pengguna dibahas dan ditindaklanjuti dalam upaya-upaya untuk melakukan perbaikan. Keberhasilan pertemuan tinjauan manajemen ini tergantung pada komitmen untuk melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan sesuai dengan apa yang direkomendasikan dan kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan.